



## **Etika Jurnalisme Politik di Media Online: Analisis Framing dan Prinsip Dakwah Komunikasi dalam Pemberitaan Pemilu di Indonesia**

### ***Ethics of Political Journalism in Online Media: Framing Analysis and Principles of Communication Da'wah in Election Reporting in Indonesia***

**Andi Hadi Ibrahim Baso<sup>1</sup>, Arham Selo<sup>2</sup>, Hasan bin Juhanis<sup>3\*</sup>**

<sup>1,2</sup>Dakwah dan Komunikasi, Dirasaat Islamiyah, UINAM

<sup>3</sup>Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Agama Islam, UNISMUH

Email: [iandihadi@yahoo.co.id](mailto:iandihadi@yahoo.co.id)<sup>1</sup>, [arham.selo@uin-alauddin.ac.id](mailto:arham.selo@uin-alauddin.ac.id)<sup>2</sup>, [hasanbinjuhanis@unismuh.ac.id](mailto:hasanbinjuhanis@unismuh.ac.id)<sup>3\*</sup>

#### **Article Info**

##### **Article history :**

Received : 23-12-2025

Revised : 24-12-2025

Accepted : 26-12-2025

Published : 28-12-2025

#### **Abstract**

*This research investigates the ethical dimensions of political journalism in Indonesian online media, specifically focusing on election reporting. It addresses the accelerated circulation of political information in the digital space, which heightens the risk of polarization and public discourse distortion. The study aims to analyze framing tendencies and the application of balance principles (multi-source, clarification, proportionality) in election news. Furthermore, it integrates the ethical framework of Dakwah and Communication, utilizing principles such as tabayyun (clarification), amanah (information trustworthiness), qaulan sadidan (truthful communication), and maslahah (social benefit) to evaluate the media's contribution to a healthy public sphere. Employing a qualitative content analysis approach, the methodology involves thematic coding of news articles' elements like headlines, leads, and source quotations. The findings are expected to map dominant frames (elite conflict, public policy, moral/identity, procedural-legal) and assess the quality of balance in controversial issues. The conclusion emphasizes the necessity for operational ethical standards to ensure political journalism serves as enlightening, informative, rational, and fair public communication, minimizing divisive rhetoric. The implications suggest reinforcing verification, source proportionality, context transparency, and linguistic accountability to maintain a democratic public sphere.*

**Keywords: Political Journalism, Framing Analysis, Da'wah Communication**

#### **Abstrak**

Penelitian ini menginvestigasi dimensi etika jurnalisme politik pada media daring di Indonesia, dengan fokus khusus pada pemberitaan pemilihan umum. Studi ini menyoroti percepatan sirkulasi informasi politik di ruang digital yang meningkatkan risiko polarisasi dan distorsi wacana publik. Penelitian bertujuan untuk menganalisis kecenderungan pembingkai (framing) dan penerapan prinsip keberimbangan (multisumber, klarifikasi, proporsionalitas) dalam berita pemilu. Lebih lanjut, penelitian ini mengintegrasikan kerangka etika Dakwah dan Komunikasi, menggunakan prinsip-prinsip seperti tabayyun (klarifikasi), amanah (kepercayaan informasi), qaulan sadidan (komunikasi yang jujur), dan maslahah (manfaat sosial) untuk mengevaluasi kontribusi media terhadap ruang publik yang sehat. Dengan menggunakan pendekatan analisis isi kualitatif, metodologi penelitian melibatkan pengodean tematik terhadap elemen-elemen artikel berita seperti judul (headline), teras berita (lead), dan kutipan sumber. Temuan penelitian diharapkan dapat memetakan bingkai dominan (konflik elit, kebijakan publik, moral/identitas, prosedural-hukum) serta menilai kualitas keberimbangan dalam isu-isu kontroversial. Simpulan penelitian menekankan perlunya standar etika operasional untuk memastikan jurnalisme politik berfungsi sebagai komunikasi publik yang mencerahkan, informatif, rasional, dan adil, guna meminimalkan retorika yang memecah belah. Implikasi penelitian menyarankan penguatan verifikasi, proporsionalitas sumber, transparansi konteks, dan akuntabilitas linguistik untuk menjaga ruang publik yang demokratis.

**Kata Kunci: Jurnalisme Politik, Analisis Framing, Dakwah Komunikasi**



## PENDAHULUAN

Dalam lanskap digital kontemporer, sirkulasi informasi politik yang cepat meningkatkan risiko polarisasi dan distorsi dalam wacana publik (Warin, 2024). Selama periode pemilihan, media online tidak hanya menyampaikan fakta tetapi juga membingkai realitas politik, mempengaruhi pemahaman publik tentang kandidat, masalah, dan proses demokrasi. (Gerth et al., 2009) Studi ini menggali etika jurnalisme politik dengan berfokus pada dua bidang utama: kecenderungan pembingkai yang lazim dalam berita pemilu dan penerapan prinsip-prinsip keseimbangan, yang mencakup pelaporan multi-sumber, klarifikasi, dan proporsionalitas (Amadu et al., 2022). Selanjutnya, penelitian mengintegrasikan dimensi Dakwah dan Komunikasi sebagai kerangka etika komunikasi publik, khususnya meneliti prinsip-prinsip seperti *tabayyun* (klarifikasi), amanah informasi (kepercayaan informasi), *qaulan sadidan* (komunikasi yang jujur), dan masalah (manfaat sosial). Tujuannya adalah untuk menilai bagaimana pelaporan pemilu berkontribusi untuk menjaga ruang publik yang sehat (Munawaroh & Marlina, 2025).

Penelitian ini sangat penting untuk memahami bagaimana pola pembingkai yang dominan dalam berita pemilu online Indonesia berdampak pada persepsi publik dan stabilitas demokrasi. Ini menyelidiki sejauh mana prinsip-prinsip keseimbangan, termasuk cakupan dan klarifikasi multi-sumber, diterapkan dalam pelaporan pemilihan. Selain itu, ia menganalisis bagaimana prinsip-prinsip etika Dakwah dan komunikasi *Tabayyun*, amanah informasi, *qaulan sadidan*, dan masalah tercermin dalam praktik pelaporan politik (Subagyo & Alwatan, 2024). Studi ini berusaha mengidentifikasi model praktik etika yang ideal untuk memperkuat jurnalisme politik dalam mendukung ruang publik yang demokratis. Kontribusi teoretis dari penelitian ini terletak pada memperkaya wacana jurnalisme politik, pembingkai, dan etika komunikasi dengan mengintegrasikan perspektif Dakwah Komunikasi. Praktis, ia menawarkan masukan untuk standar editorial untuk meningkatkan akurasi, keseimbangan, dan dampak sosial dari pelaporan. Secara sosial, penelitian ini bertujuan untuk menumbuhkan literasi demokrasi publik dan mengurangi polarisasi yang didorong oleh informasi yang tidak seimbang.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis konten kualitatif untuk mengkaji etika jurnalisme politik di media online Indonesia selama pemilu. Perhatian utama adalah potensi polarisasi dan distorsi dalam wacana publik karena sirkulasi informasi yang cepat. Penelitian ini berfokus pada dua bidang utama: mengidentifikasi kecenderungan pembingkai dominan dalam berita pemilu dan menilai penerapan prinsip-prinsip keseimbangan (multi-sumber, klarifikasi, proporsionalitas) (Harahap & Adeni, 2025). Bagian integral dari penelitian ini adalah penggabungan prinsip-prinsip etika Dakwah dan Komunikasi, termasuk *tabayyun* (klarifikasi), amanah informasi (kepercayaan informasi), *qaulan sadidan* (komunikasi yang jujur), dan *masalah* (manfaat sosial), untuk mengevaluasi peran media dalam membina ruang publik yang sehat (Silaen et al., 2025).

Penelitian ini berfokus pada pelaporan pemilu di media online nasional di Indonesia, khususnya media arus utama dengan jangkauan luas. Sementara teks yang disediakan tidak menentukan lokasi geografis yang tepat di Indonesia, ruang lingkup penelitian ini bersifat nasional, mencakup outlet media online yang secara intensif melaporkan kontes politik.



Pengumpulan data melibatkan pendokumentasian dan pengarsipan artikel berita dari media online nasional terpilih selama periode pemilihan (misalnya, fase kampanye, debat, dan pemungutan suara). Sumber data primer meliputi artikel berita pemilu dan laporan analisis politik, sedangkan sumber sekunder terdiri dari dokumen resmi dan rilis dari penyelenggara pemilu, serta pernyataan aktor politik. Dokumen pendukung seperti peraturan, putusan, dan data resmi yang dikutip oleh media juga dipertimbangkan. Unit analisis untuk penelitian ini adalah artikel berita pemilu, yang meliputi judul, petunjuk, teks isi, kutipan sumber, data pendukung, dan kesimpulan.

Analisis data menggunakan analisis konten tematik, dengan fokus pada tiga kategori utama: (1) pembingkai berita, (2) kualitas keseimbangan, dan (3) refleksi Dakwah Etika komunikasi dalam struktur naratif dan pilihan bahasa. Setiap artikel diklasifikasikan berdasarkan kerangka dominannya, yang mencakup konflik elit, kebijakan publik, moral/identitas, dan kerangka prosedural-hukum (Aswan et al., 2024). Kualitas keseimbangan dinilai melalui indikator seperti pelaporan multi-sumber, yang mencakup kedua sisi, klarifikasi/hak balasan, dan konteks data. Indikator etika dari Dakwah Komunikasi, khususnya *tabayyun* (pemeriksaan silang), amanah (akurasi & tanggung jawab), *qaulan sadidan* (bahasa faktual & non-manipulatif), dan *masalah* (meminimalkan polarisasi/fitnah), digunakan untuk mengevaluasi aspek komunikasi etis. Temuan ditabulasikan untuk mengidentifikasi jenis bingkai, keragaman sumber, keberadaan klarifikasi, konteks data, dan potensi polarisasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pola Pembingkai Dominan dalam Berita Pemilu**

Dominasi pembingkai konflik elit dan identitas dalam media online menciptakan ekosistem informasi yang cenderung reaktif daripada edukatif (Hiaeshutter-Rice et al., 2024). Ketika media lebih mengutamakan aspek dramatis dari perseteruan antar aktor politik, masyarakat terjebak dalam pusaran sentimen emosional yang sering kali bersifat dangkal. Hal ini mengakibatkan "biaya informasi" bagi pemilih menjadi sangat tinggi; mereka harus bekerja ekstra keras untuk menyaring substansi program kerja di tengah kebisingan retorika politik (van der Goot et al., 2025). Jika pola ini dibiarkan tanpa adanya intervensi dari literasi media yang kuat, kualitas demokrasi akan mengalami degradasi karena keputusan pemilih tidak lagi didasarkan pada evaluasi rasional atas visi dan misi, melainkan pada loyalitas buta atau kebencian terhadap figur tertentu yang dikonstruksi oleh media (Garzia et al., 2020).

Sebagai akibatnya, penting untuk meningkatkan literasi media di kalangan masyarakat agar mereka dapat lebih kritis dalam menilai informasi yang disajikan oleh media dan tidak terjebak dalam narasi yang bias (Rambe et al., 2025). Pendidikan literasi media yang efektif dapat membantu masyarakat memahami bagaimana framing berita memengaruhi persepsi politik dan mendorong mereka untuk lebih aktif dalam mengevaluasi informasi yang diterima (Rambe et al., 2025). Masyarakat yang memiliki keterampilan literasi media yang baik akan lebih mampu mengidentifikasi hoaks dan menghindari pengaruh negatif dari framing media yang tidak objektif (Asmaranti et al., 2024). Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan literasi media harus melibatkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan media itu sendiri.

Di sisi lain, penguatan pembingkai kebijakan publik dan prosedural-hukum merupakan kunci untuk memulihkan fungsi media sebagai pilar demokrasi (Patnaik & Chauhan, 2024).



Pembingkiaan kebijakan memaksa kandidat untuk mempertanggungjawabkan janji-janji mereka secara teknis, sementara pembingkiaan prosedural memberikan kepastian hukum yang dapat meredam penyebaran hoaks dan teori konspirasi terkait hasil pemilu (Del Carpio & Rodriguez-Paiva, 2024). Transformasi menuju pemberitaan yang lebih substantif ini memerlukan pergeseran paradigma dari model bisnis media yang sekadar mengejar *clickbait* menuju jurnalisme yang berorientasi pada kepentingan publik. Dengan memetakan dominasi kerangka ini, kita dapat melihat sejauh mana media telah menjalankan peran edukasinya atau justru terjebak menjadi alat amplifikasi polarisasi sosial (Samantray et al., 2021).

Oleh karena itu, penting untuk mendorong praktik jurnalisme yang lebih berorientasi pada etika, dengan fokus pada akurasi, proporsionalitas, dan tanggung jawab sosial dalam pemberitaan politik. Dengan demikian, media harus berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip etika dakwah-komunikasi, seperti *tabayyun* dan amanah, agar dapat memberikan informasi yang lebih akurat dan berimbang. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas jurnalisme politik di Indonesia, terutama dalam konteks pemilu yang semakin kompleks dan dinamis (Arisanto, 2023). Dengan menerapkan kerangka etika komunikasi publik yang kuat, media dapat berkontribusi positif terhadap pembentukan opini publik yang lebih sehat dan beradab.

### **Kualitas Keseimbangan dan Verifikasi**

Keseimbangan etika dalam jurnalisme melampaui sekadar menyajikan dua sisi; itu membutuhkan memastikan bahwa informasi yang diberikan telah diverifikasi secara memadai (Misra, 2019). Prinsip *tabayyun* (klarifikasi) mengharuskan klaim pemeriksaan silang, mencari klarifikasi dari pihak yang terlibat, dan merujuk dokumen atau data yang relevan. Untuk masalah kontroversial, keseimbangan berbasis verifikasi sangat penting untuk mencegah publik menarik kesimpulan prematur dan untuk mengurangi efek 'uji coba' oleh media (Badrudin, 2025). Penelitian ini mengevaluasi kualitas keseimbangan, termasuk pelaporan multi-sumber, klarifikasi, dan proporsionalitas, dalam berita pemilu (Takens et al., 2013).

Penelitian ini juga mempertimbangkan bagaimana prinsip etika dakwah-komunikasi dapat diterapkan dalam praktik jurnalisme politik untuk meningkatkan kualitas pemberitaan (Valim, 2023). Penerapan prinsip-prinsip ini tidak hanya meningkatkan akurasi informasi tetapi juga berkontribusi pada terciptanya ruang publik yang lebih sehat dan demokratis. Penerapan prinsip-prinsip ini sejalan dengan pentingnya menjaga akurasi, proporsionalitas, dan tanggung jawab dalam jurnalisme politik, yang pada gilirannya mendukung ruang publik demokratis (Sehl, 2024).

Penerapan prinsip-prinsip tersebut menciptakan lingkungan informasi yang lebih transparan dan akuntabel, sehingga memperkuat integritas jurnalisme dalam konteks pemilu (Nurmansyah & Erman, 2025). Penerapan etika jurnalisme yang kuat dapat membantu membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa informasi yang disampaikan adalah akurat dan bermanfaat bagi masyarakat (Rezaee et al., 2024). Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa jurnalisme politik berfungsi sebagai alat yang mencerahkan dan mendukung demokrasi yang sehat.

### **Penerapan Dakwah Etika Komunikasi**

Jurnalisme politik, dilihat melalui lensa *Dakwah* dan Komunikasi, membawa implikasi moral sebagai bentuk komunikasi publik. Prinsip-prinsip utama meliputi: (Parry-Giles, 2022)



1. *Tabayyun*: Memerlukan klarifikasi dan verifikasi sebelum informasi dikonsumsi dan disebarluaskan.
2. Amanah Informasi (Trust Informasi): Menekankan tanggung jawab atas akurasi, proporsionalitas, dan dampak sosial pelaporan. Dalam praktiknya, ini berarti sumber primer yang jelas, presentasi kontekstual (kronologi dan data), dan pemisahan fakta dari pendapat.
3. *Qaulan Sadidan* (Komunikasi yang Benar): Menuntut komunikasi yang jujur, tegas, dan non-manipulatif. Ini termasuk berita utama yang tidak menyesatkan, diksi non-menghakimi, dan dasar faktual untuk istilah evaluatif.
4. *Maslahah* (Manfaat Sosial): Berfokus pada kepentingan publik dan tatanan sosial sebagai pertimbangan etis. Dalam pelaporan pemilu, *maslahah* dapat dicapai dengan menghindari sensasionalisme, menolak ujaran kebencian, dan mempromosikan diskusi kebijakan yang menguntungkan warga negara. Prinsip ini juga bertujuan untuk memperkuat kerangka kebijakan publik dan mengurangi normalisasi kerangka konflik/identitas yang memecah belah.

Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai kerangka etika untuk menilai apakah pembingkaihan dan keseimbangan berita berkontribusi pada ruang publik yang sehat. Implikasi penelitian ini menggarisbawahi perlunya standar etika operasional untuk memastikan fungsi jurnalisme politik sebagai komunikasi publik yang mencerahkan, informatif, rasional, dan adil, meminimalkan retorika yang memecah belah (Marciel, 2025). Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, jurnalisme politik dapat berkontribusi pada pembentukan ruang publik yang lebih demokratis dan inklusif, sekaligus mengurangi potensi konflik sosial.

### **Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pelaporan**

Beberapa faktor dapat mempengaruhi kualitas pelaporan berita politik (Siker, 2019):

#### **1. Faktor Internal:**

- a. Budaya editorial dan kebijakan mengenai standar verifikasi dan koreksi.
- b. Tekanan untuk publikasi cepat dan target lalu lintas.
- c. Kompetensi reporter dan editor politik dalam memeriksa klaim dan data.
- d. Pertimbangan etis dalam penulisan judul dan penataan narasi untuk menghindari bias.

#### **2. Faktor Eksternal:**

- a. Strategi komunikasi aktor politik (misalnya, spin, pembingkaihan kampanye, klaim sepihak, perang naratif).
- b. Sifat viral dari media sosial, yang mendorong media untuk mengejar isu-isu populer dan sering membuat kutipan cepat.
- c. Akses publik terbatas untuk data resmi yang lengkap dan tepat waktu tentang masalah tertentu.

### **Model Ideal untuk Jurnalisme Politik Etis**

Model ideal untuk jurnalisme politik etis, mengintegrasikan standar jurnalistik dengan Dakwah-Etika komunikasi, akan mencakup (Gori, 2018):





1. Standar *Tabayyun* Minimal: Untuk masalah kontroversial, ini berarti menggunakan banyak sumber, mengklarifikasi dengan pihak terkait, dan mengutip dokumen yang relevan.
2. Keseimbangan Bertanggung Jawab: Tidak hanya menyajikan dua sisi, tetapi memastikan proporsionalitas berdasarkan bobot fakta dan bukti.
3. *Qaulan Sadidan* dalam Menulis: Berita utama dan narasi yang akurat, non-manipulatif, tidak menghasut, dan tidak menstigmatisasi.
4. *Maslahah* Orientasi: Memperkuat kerangka kebijakan publik dan mengurangi normalisasi kerangka konflik/identitas yang memecah belah.
5. Akuntabilitas ruang beritas: Kebijakan koreksi yang jelas dan transparansi sumber utama.

Kualitas etika jurnanisme politik ditentukan oleh kecenderungan pembingkai dan kualitas keseimbangan dalam pelaporan pemilu online. Mengintegrasikan perspektif *Dakwah* dan Komunikasi memperkuat penilaian etika melalui prinsip-prinsip seperti *tabayyun*, amanah informasi, *qaulan sadidan*, dan *maslahah*. Konflik elit yang dominan dan kerangka moral/identitas berisiko mengalihkan wacana publik dari substansi kebijakan dan memperburuk polarisasi (Saragih, 2024). Oleh karena itu, penguatan verifikasi, proporsionalitas sumber, transparansi konteks, dan akuntabilitas bahasa sangat penting untuk mempertahankan ruang publik yang demokratis.

## KESIMPULAN

1. Kualitas etika jurnanisme politik pada media daring di Indonesia sangat ditentukan oleh kecenderungan pembingkai (*framing*) dan konsistensi penerapan prinsip keberimbangan. Temuan menunjukkan bahwa pemberitaan pemilu masih didominasi oleh **bingkai konflik elit** dan **moral/identitas**, yang berisiko mendistorsi wacana publik menjadi drama politik serta memperparah polarisasi sosial. Di sisi lain, pembingkai prosedural-hukum dan kebijakan publik masih perlu ditingkatkan untuk memberikan edukasi demokrasi yang substansial kepada masyarakat.
2. Integrasi perspektif **Etika Dakwah dan Komunikasi** memberikan landasan moral yang kuat bagi jurnanisme politik. Prinsip *Tabayyun* (verifikasi) dan *Amanah* (tanggung jawab informasi) menjadi kunci dalam mengatasi tekanan kecepatan sirkulasi informasi digital. Penggunaan *Qaulan Sadidan* memastikan narasi berita bersifat faktual dan non-manipulatif, sementara orientasi pada *Maslahah* menempatkan kepentingan publik di atas sensasionalisme.
3. Sebagai model ideal, jurnanisme politik harus bertransformasi dari sekadar penyaji kutipan cepat menjadi media yang mengedepankan keberimbangan proporsional, transparansi konteks, dan akuntabilitas linguistik. Hal ini penting untuk memastikan media daring tetap berfungsi sebagai pilar demokrasi yang mencerahkan dan mampu menjaga kesehatan ruang publik dari retorika yang memecah belah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amadu, M. F., Mumuni, E., & Chentiba, A. T. (2022). Journalistic ethics and elections news coverage in the Ghanaian press: a content analysis of two daily Ghanaian newspaper coverage of election 2020. *Journal of Information, Communication and Ethics in Society*. <https://doi.org/10.1108/jices-04-2022-0039>



- Asmaranti, A. D., Rahayu, R. D. S., & Fitrie, R. A. (2024). *Analisis Daya Pikir Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Guna Menangkal Berita Hoax Mengenai Pemilihan Umum 2024*. <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i2.1175>
- Aswan, Mukti, Abd., & Ritonga, A. A. (2024). Rediscovering the Hiwar Method: Revitalizing An-Nahlawi's Dialogue Approach in Contemporary Islamic Education. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v16i4.6366>
- Badruddin. (2025). *Formulasi tabayyanu: strategi cepat guna dalam menyikapi informasi di era transformasi digital*. <https://doi.org/10.71282/at-taklim.v1i1.2>
- Garzia, D., Ferreira da Silva, F., & De Angelis, A. (2020). Image that Matters: News Media Consumption and Party Leader Effects on Voting Behavior. *The International Journal of Press/Politics*. <https://doi.org/10.1177/1940161219894979>
- Gerth, M. A., Rademacher, P., Pühringer, K., Dahinden, U., & Siegert, G. (2009). Challenges to Political Campaigns in the Media: Commercialization, Framing, and Personalization. *Studies in Communication Sciences*. <https://doi.org/10.5167/UZH-20005>
- Gori, N. (2018). Codes of ethics for political parties and their role in communication (in the time of electoral campaigns). *Postmodern Openings*. <https://doi.org/10.18662/PO/10>
- Harahap, M. A., & Adeni, S. (2025). Journalism Ethic in Online Media in Indonesia. *International Journal of Social Science and Human Research*. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v8-i8-88>
- Hiaeshutter-Rice, D., Madrigal, G., Ploger, G., Carr, S., Carbone, M., Battocchio, A. F., & Soroka, S. (2024). Identity Driven Information Ecosystems. *Communication Theory*. <https://doi.org/10.1093/ct/qtae006>
- Marciel, R. (2025). Deliberative Newsworthiness: A Normative Criterion to Promote Deliberative Democracy. *Journal of Media Ethics*. <https://doi.org/10.1080/23736992.2024.2444207>
- Misra, N. K. (2019). *Media Ethics and Responsibility*. <https://doi.org/10.25215/9189860713>
- Munawaroh, S., & Marlina, N. S. (2025). *Ethics of Social Media Communication from an Islamic Perspective: A Qualitative Study of Muslim Practices in Indonesia*. <https://doi.org/10.59784/ijcpd.v2i1.10>
- Nurmansyah, G., & Erman, E. (2025). Participatory monitoring of electoral integrity: perspectives of independent monitors and civil society. *Pranata Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v20i2.413>
- Parry-Giles, T. (2022). *Political Communication*. <https://doi.org/10.4324/9781003220466-16>
- Patnaik, U., & Chauhan, A. S. (2024). Derailing of Fourth Pillar of the Democracy and Future of Accountable, Transparent Democratic System. *International Journal For Multidisciplinary Research*. <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i02.14692>
- Rambe, A. S., Sahlaya, M. R., Andini, A., Firdasari, S., & Akbar, R. A. (2025). Analisis Kerangka Media dalam Isu-Isu Politik Kontemporer. *Algebra : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Sains*. <https://doi.org/10.58432/algebra.v5i2.1316>
- Rezaee, M. T., Sayes, A., & Bahaduri, J. khan. (2024). Study of the Framework and Attributes of Ethical Standards in Journalism. *Sprin Journal of Arts, Humanities and Social Sciences*. <https://doi.org/10.55559/sjahss.v3i11.435>
- Saragih, M. Y. (2024). Journalistic Ethics in Covering Sharia Economic Issues: An Islamic Perspective. *Cognizance Journal*. <https://doi.org/10.47760/cognizance.2024.v04i10.012>



- Sehl, A. (2024). Public service media as pivotal in combating misinformation and disinformation: prerequisites and approaches. *European Journal of Communication*. <https://doi.org/10.1177/02673231241294185>
- Siker, S. W. (2019). *Measuring the Effects of Interpretive Journalism on Trust and Credibility Perceptions in the Context of Political News Coverage*. <https://doi.org/10.33915/ETD.4098>
- Silaen, M. D., Nasution, H., & Azhar, A. A. (2025). Strategi Resolusi Konflik Politik Lokal Berbasis Nilai Komunikasi Nabi di Labuhan Batu Selatan. *Islam & Contemporary Issues*. <https://doi.org/10.57251/ici.v5i1.1669>
- Subagyo, H. N., & Alwatan, Y. (2024). Framing Election Fraud in Indonesia's 2024 Elections: A Comparative Analysis of Tempo.co and Republika.com. *Channel*. <https://doi.org/10.12928/channel.v12i2.970>
- Takens, J. H., van Atteveldt, W., van Hoof, A. M. J., & Kleinnijenhuis, J. (2013). Media logic in election campaign coverage. *European Journal of Communication*. <https://doi.org/10.1177/0267323113478522>
- Valim, R. (2023). *Ethics in social communications*. <https://doi.org/10.56238/connexpemultidisdevolpfut-042>
- van der Goot, E., van der Meer, T. G. L. A., Hameleers, M., & Vliegthart, R. (2025). Do Politicians Knowingly Create Conflict to Gain Media Attention?: How Politicians Navigate a Mediatized Environment Characterized by Negativity and Conflict. *Journalism & Mass Communication Quarterly*. <https://doi.org/10.1177/10776990241312150>
- Warin, T. (2024). *Disinformation in the Digital Age: Impacts on Democracy and Strategies for Mitigation*. <https://doi.org/10.54932/gqwb1497>